

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NO.05 PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh :

LOUIS CARLOS RAFAEL GRAFITO MANOREK

NIM: 20 043 117



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO - JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan penelitian.....	3
1.4 Ruang Lingkup Penulisan	4
1.5 Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Akuntansi Pemerintahan.....	5
2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	6
2.3 Pemerintahan Daerah.....	7
2.4 Pengertian persediaan.....	8
2.4.1 Jenis Persediaan	9
2.4.2 Perencanaan Kebutuhan Persediaan.....	9
2.4.3 Mekanisme Penatausahaan Persediaan	9
2.4.4 Proses pembukuan.....	10
2.4.5 Opname fisik persediaan	10
2.5 Akuntansi Persediaan	11

2.6	PSAP No.05	12
2.7	Penelitian terdahulu	14
2.8	Kerangka pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN		18
3.1	Jenis Penelitian.....	18
3.2	Tempat Dan Waktu Penelitian	18
3.3	Sumber Data.....	19
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.5	Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		21
4.1	Gambaran Umum Instansi	21
4.1.1	Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.....	21
4.1.2	Lokasi Instansi	22
4.1.3	Visi Dan Misi.....	22
4.1.5	Struktur Organisasi	23
4.2	Akuntansi Persediaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara .	31
4.2.1	pengakuan persediaan	33
4.2.2	Pengukuran Persediaan.....	34
4.2.3	Beban persediaan.....	38
4.2.4	Pengungkapan Persediaan.....	39
4.3	Analisis dengan PSAP No.05.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		43
5.1	Kesimpulan	43
5.2	Rekomendasi.....	44
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan publik, hal ini menandai dimulainya reformasi Keuangan publik di Indonesia. Jika sebelum dilaksanakannya Reformasi keuangan Negara prinsip Akuntansi Pemerintahan diterapkan berdasarkan kas, penerapan akuntansi kas dalam pengelolaan Negara dinilai kurang efektif pada saat itu. Karena sepertinya mereka belum mampu menjelaskan keadaan Akuntansi Negara dan memberikan gambaran yang akurat. Dengan demikian, lahirnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 merupakan Reformasi yang dilakukan pemerintahan yang mengubah sistem akuntansi dari berbasis tunai menjadi berbasis akrual. Perubahan sistem dari metode *money based* menjadi metode *accrual based* disebabkan karena metode *accrual based* dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai informasi pelaporan keuangan Negara dengan lebih efektif.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan yang menjadi landasan baru dalam pelaksanaan pelaporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah, sehingga peraturan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan laporan Keuangan Pemerintah. Aturan tersebut adalah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang lebih rinci pada pasal 4 ayat 1 tentang PSAP berbasis akrual. Ada beberapa prinsip dalam SAP yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan selama ini.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, pembahasan kali ini memuat kerangka konseptual SAP. Kerangka acuan konseptual SAP merupakan pedoman dasar bagi satuan kerja administrasi publik sebelum menyusun laporan keuangan dan prinsip Akuntansi. Menurut proses penyusunan prinsip akuntansi terdiri dari dua hal, yaitu prinsip pelaporan keuangan dan prinsip akuntansi yang diterapkan pada informasi akun yang jenisnya dijelaskan dalam PSAP 05.

PSAP 05 juga bertanggung jawab mengelola penyediaan terkait untuk selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Persediaan berdasarkan PSAP 05 sebagai bagian dari aktiva lancar yang dapat berupa barang atau peralatan yang peranannya untuk menunjang kegiatan operasional instansi pemerintah, bahan

atau peralatan yang dapat digunakan untuk menunjang produksi kegiatan atau komoditas di dalamnya terdapat standar berdasarkan PSAP 05 yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persediaan yaitu pencatatan persediaan, pengukuran pengungkapan persediaan dan pelaporan persediaan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara adalah unsur pelaksana dari lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bertanggung jawab dalam bidang kelautan dan perikanan.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara telah diatur berdasarkan peraturan daerah (perda) Provinsi Sulawesi Utara sesuai keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007, tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah sekaligus sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya, Jenis-jenis persediaan yang ada pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara seperti ATK, kertas cover, bahan komputer, bahan cetak sebagai penunjang kerja para pegawai serta pakan ikan, bibit-bibit ikan, serta Keramba Jaring Apung (KJA) untuk diberikan kepada masyarakat.

Akuntansi persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara mengatur penatausahaan persediaan di lingkungan. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya tertib administrasi persediaan yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai akuntansi persediaan seperti, Persediaan adalah aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan dijual atau diserahkan kepada masyarakat, Persediaan diakui ketika pemerintah daerah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, Persediaan juga diakui ketika hak kepemilikan atau penguasaan persediaan berpindah, Pengendalian persediaan dapat meminimalisir kecurangan, kerusakan, dan kehilangan persediaan, Hewan atau tanaman air dalam Laporan Keuangan KKP diakui sebagai persediaan dan aset tetap lainnya, Sebagian indukan yang diakui sebagai aset tetap lainnya tidak disajikan dalam neraca, Hewan

atau tanaman air yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan sebagian indukan lainnya yang diakui sebagai persediaan disajikan dalam neraca.

Adapula cara penatatan Persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara seperti Persediaan dikelompokkan sebagai aktiva lancar, Persediaan diakui pada akhir periode Akuntansi, Hewan dan tanaman air diakui sebagai persediaan dan aset tetap lainnya, Hewan dan tanaman air yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat dicatat sebagai persediaan dan disajikan pada neraca, Sebagian indukan yang diakui sebagai aset tetap lainnya tidak disajikan pada neraca.

Pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara harus berjalan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Namun karena Pengukuran persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulut masih belum sepenuhnya menerapkan PSAP No.05, karena pembelian persediaan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan aset melainkan masih ada pembelian dengan pendekatan beban, hal ini yang menjadi penguatan bagi penulis untuk mengangkat judul Skripsi “**Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 05 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara**”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

Apakah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan akuntansi persediaan yang sesuai berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAP 05.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Akuntansi persediaan berdasarkan PSAP Nomor 05 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan ini memiliki fokus utama untuk membahas tentang kesesuaian penerapan Akuntansi persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dengan teori dan proses penerapan akuntansi persediaan yang berdasarkan pada PSAP 05. Pada PSAP No.05 terdiri dari atas pengertian persediaan, pengklasifikasian persediaan, pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, pencatatan persediaan, penyajian dan pengungkapan persediaan.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan atas penjelasan diatas terdapat manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu antara lain

- 1) Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, sebagai masukan mengenai penerapan Akuntansi persediaan sesuai PSAP No.05
- 2) Bagi Politeknik Negeri Manado, sebagai masukan dalam hal pengembangan kurikulum prodi D4 Akuntansi Keuangan khususnya mata kuliah Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang penerapan Akuntansi Persediaan berdasarkan PSAP No.05.

